

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



JOKOWI MINTA FASILITAS BARU DI PURA BESAKIH DIKELOLA DENGAN BAIK



PEMKOT DENPASAR UTAMAKAN TATA KELOLA PENANGANAN SAMPAH | Hal. 4

PEMKAB BADUNG LAMPAUI TARGET PENURUNAN ANGKA STUNTING DI WILAYAHNYA

Hal. 6



HAL
3

Gubernur Bali Raih Penghargaan Berkat Selesaikan Konflik Agraria

Gubernur Bali Wayan Koster meraih penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Hadi Tjahjanto berkat berhasil menyelesaikan konflik agraria.

Berdasarkan siaran Humas Pemrov Bali di Denpasar, Menteri ATR/BPN memberikan penghargaan lantaran Wayan Koster dinilai telah bekerja mendukung penyelesaian konflik pertanahan melalui pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Bali.

Penghargaan tersebut diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra yang sekaligus hadir dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2023 dengan tema 'Peningkatan Investasi Melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan'.

Disebutkan bahwa penangan konflik pertanahan melalui pelaksanaan reforma agraria yang dilakukan Gubernur Koster antara lain menyelesaikan konflik

agraria sejak tahun 1960 di Desa Sumberklompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

"Seluas 612 hektare (tanah di Desa Sumberklompok), di mana masyarakat mendapatkan 458 hektare lengkap dengan sertifikatnya dan Pemrov Bali mendapat 154 hektare, penyerahan sertifikat dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 dan tanggal 22 September 2021," kata Dewa Made Indra.

Tak hanya itu, di kepemimpinan Wayan Koster konflik agraria di Kelurahan Tanjung Benoa, Badung, yang telah berlangsung sejak tahun 1920 terselesaikan.

Konflik terjadi di atas tanah seluas 2,5 hektare dan terdiri dari 90 sertifikat yang akhirnya dapat diberikan pada 30 Mei



Sekda Bali Dewa Made Indra menerima penghargaan untuk Gubernur Wayan Koster berkat selesaikan konflik agraria. ANTARA/HO-Pemprov Bali

2022 lalu.

"Lalu, menyelesaikan konflik agraria sejak tahun 1970 di Kali Unda, Kelurahan Semarapura Kangin, Klungkung seluas 1,3 hektare terdiri dari 69 sertifikat, penyerahan sertifikat dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2022," lanjut Sekda Dewa Made.

Koster juga menyelesaikan konflik agraria sejak tahun 1956 di Desa Adat Buleleng, Kabupaten Buleleng di tanah seluas 2,8 hektar yang diperruntukkan bagi 72 KK, dan penyerahan sertifikat tanahnya dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022. (ant)

Pembangunan Pasar Singamandawa Didanai Rp75 miliar dari APBN



Gubernur Bali Wayan Koster saat peletakan batu pertama pembangunan Pasar Singamandawa, Denpasar, Kamis (9/3/2023). ANTARA/HO-Pemprov Bali

GUBERNUR Bali Wayan Koster melakukan peletakan batu pertama Pembangunan Pasar Singamandawa di Kintamani, Bangli, yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp75 miliar yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN).

"Selamat atas dimulainya pembangunan Pasar Singamandawa yang dilakukan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta. Untuk merealisasikan pembangunan pasar ini tidak mudah, karena membutuhkan anggaran

yang besar," kata Koster dalam siaran Humas Pemrov Bali yang diterima di Denpasar, Kamis.

Gubernur Koster mengakui bahwa diperlukan konsep bekerja bersama dan berjuang bersama untuk berhasil menembus dana Rp75 miliar untuk pembangunan pasar di Kintamani tersebut.

Mengingat, dana tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sepenuhnya berasal dari APBN yang selama ini diperjuangkan oleh seluruh daerah di Indonesia.

Gubernur asal Buleleng itu menyebut dari 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia, Provinsi Bali termasuk daerah yang paling beruntung dan harus bersyukur, sebab hampir sebagian daerah di Pulau Dewata berhasil mendapatkan program bantuan dana tersebut.

Kabupaten/kota tersebut, antara lain Denpasar, Kabupaten

Gianyar, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung, dengan anggaran yang sama, yaitu masing-masing mendapatkan bantuan Rp75 miliar.

"Jadi, turunnya anggaran ini bukan datang dari langit, tetapi diperoleh dari suatu perjuangan yang tidak mudah, karena persaingan antar-kabupaten/kota di Indonesia itu sangat ketat," ujar Koster.

Dengan mulai dibangunnya Pasar Singamandawa lewat bantuan APBN tersebut, Wayan Koster mengarahkan agar proyek ini dibentuk sebagai pasar rakyat, dimana pembangunannya jangan sampai dibuat terlalu modern.

"Tetapi, dibangun sesuai dengan cara berjualan para pedagang agar pasar ini mudah diakses oleh masyarakat dan tercipta rasa aman, nyaman dalam berdagang," kata Koster. (ant)

Presiden Jokowi Minta Fasilitas Baru di Pura Agung Besakih Dikelola Dengan Baik

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) saat hadir pada peresmian fasilitas baru di kawasan Pura Agung Besakih, Karangasem, meminta agar infrastruktur di pura terbesar di Bali tersebut dikelola dengan baik.

“Membangun fasilitas yang megah lebih mudah dari mengelola dan merawatnya. Untuk itu saya benar-benar ingin titip agar fasilitas yang sudah dibangun pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan dana sangat besar ini harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan profesional,” kata Presiden Jokowi, disaksikan oleh Gubernur Bali dan jajaran.

Di Karangasem, Senin, Presiden Jokowi mengarahkan agar setelah fasilitas diresmikan, harus disiapkan manajemen dengan kompetensi yang baik, sehingga nantinya seluruh kepentingan terkait Pura Agung Besakih dapat terjembatani.

Bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar dalam pengelolaannya memberi kesempatan kepada Desa Besakih, Desa Adat Besakih, dan masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi.

Pembangunan fasilitas di pura yang terletak di dekat Gunung Agung itu telah berlangsung sejak 2021, dimana Presiden Jokowi kala itu yang memerintahkan Menteri PUPR untuk melakukan penataan bersama Pemprov Bali.

Adapun yang dilakukan seperti relokasi dan penataan sejumlah pura serta pembangunan infrastruktur pendukung, diantaranya tempat parkir, kios, gedung serbaguna, wantilan, hingga akses kendaraan listrik.

Presiden Jokowi menyadari bahwa umat Hindu maupun pengunjung yang datang ke Pura Agung Besakih sangat banyak, apalagi saat Upacara Ida Bathara



Presiden Jokowi saat meresmikan fasilitas baru di kawasan Pura Agung Besakih di Karangasem, Bali, Senin (13/3/2023). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari

Turun Kabeh yang akan berlangsung Maret-April di tahun ini. Dengan demikian penting untuk menjaga kesucian, kebersihan, dan kerapian, kawasan pura demi berlangsungnya upacara dengan aman dan nyaman

“Kedatangan umat Hindu dan pengunjung yang semakin banyak tanpa diimbangi dengan pe-

nataan dan antisipasi ke depan akan menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyamanan,” kata Presiden Jokowi.

Gubernur Bali Wayan Koster turut menyampaikan bahwa Pura Agung Besakih memang pura yang sangat disucikan karena merupakan pemujaan utama Pura Khayangan Jagat terpenting. **(ant)**

Wagub Bali: Digitalisasi Buka Peluang Usaha Baru



Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat menjelaskan peran digitalisasi bagi sektor ekonomi baru di Denpasar, Jumat (10/3/2023). ANTARA/HO-Pemprov Bali

WAKIL Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan digitalisasi akan membuka peluang usaha sektor baru di luar sektor pariwisata yang selama ini menopang Bali.

“Untuk mencari sektor-sektor perekonomian potensial baru untuk menopang kebutuhan ekonomi masyarakat Bali, digitalisasi dirasa

merupakan kunci utamanya,” kata Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Denpasar, Jumat.

Ia menyampaikan dalam rangka mewujudkan ekonomi Bali yang tangguh, stabil dan berkelanjutan, maka pemerintah berupaya mengembangkan struktur fundamental perekonomian yang selama ini didominasi oleh sektor

pariwisata.

“Transformasi digital merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan Bali yang berdaulat pangan, sandang dan papan,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam BALIGIVATION atau Bali Digital Innovation Festival 2023.

Saat ini, kata dia, Pemprov Bali tengah menjadikan digitalisasi sebagai salah satu prioritas, dengan upaya yang dilakukan seperti mengembangkan infrastruktur digital bagi masyarakat.

Hingga saat ini, pihaknya telah membangun jaringan fiber optik dan layanan wifi gratis bagi seluruh desa adat dengan jumlah 1.493 desa adat, puskesmas, objek wisata serta seluruh SMA, SMK, SLB Negeri Se-Bali, dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi.

“Yang pertama apa yang kita pikirkan adalah memasang wifi

di seluruh desa adat dan fasilitas umum di Bali. Yang kita harapkan adalah komunikasi antara desa dengan sumber-sumber informasi dapat cepat terjalin sehingga informasi dapat berkembang dengan pesat,” jelas Cok Ace.

Atas usaha tersebut, Pemprov Bali dianugerahi sebagai penerima peringkat terbaik dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.

Tak berhenti di sana, Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali juga meraih peringkat pertama TP2DD terbaik Jawa-Bali dan BPD Bali menjadi bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Terbaik Nasional.

Pengembangan digitalisasi ekonomi di Pulau Dewata juga ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan pembayaran digital berbasis QRIS. **(ant)**

Pemkot Denpasar dan Pemerintah India Jajaki Kerja Sama

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menjajaki peluang kerja sama dan kolaborasi berbagai bidang dengan Pemerintah India karena dilatarbelakangi kemiripan budaya dan mayoritas penduduk beragama Hindu.

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara di Denpasar, Rabu menyambut baik kedatangan Konsul Jenderal India di Bali Neeharika Singh dan berharap agar ke depannya realisasi kerja sama kedua pihak dapat terlaksana.

"Kami menyambut baik kunjungan Mrs Neeharika Singh sebagai sebuah awal yang baik dalam konteks kerja sama dan kolaborasi antara Pemkot Denpasar dengan Pemerintah India," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat Vasudhaiva Kutumbhakam yang menjadi visi Pemkot Denpasar diadopsi dari Bahasa Sansekerta. Ini sangat mengilhami pemerintah setempat dengan tangan terbuka untuk berkolaborasi dengan



Pemerintah India.

"Kami memiliki rencana pembangunan inkubator bisnis di Denpasar, yakni salah satunya area pelaku IKM di area Pasar Kumbasari. Kami akan berikan ruang kolaborasi dengan Pemerintah India ini, salah satunya dengan memberikan ruang untuk seniman membubuhkan karya Mithila/ Madhubani painting di sana," ujarnya

Pertemuan itu juga membahas soal rencana penajakan kerja sama kedua pihak di berbagai sektor seperti pada sektor ekonomi perdagangan, pendidikan, infrastruktur serta bidang lainnya.

Konjen India di Bali Neeharika Singh dalam kesempatan tersebut



Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara bersama Consul Jenderal India di Bali Neeharika Singh di Denpasar, Rabu (1/3/2023). ANTARA/Ni HO-Pemkot Denpasar.

mengucapkan selamat atas perayaan HUT ke-235 Kota Denpasar pada 27 Februari lalu.

Dia menilai, sebagai sebuah Ibu Kota Provinsi Bali, Kota Denpasar telah banyak memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat untuk ditinggali.

"Beberapa waktu lalu, saya sempat bertemu dengan komunitas India yang tinggal di Denpasar. Mewakili para warga India yang

tinggal di Denpasar saya berterima kasih atas segala kenyamanan yang telah diberikan oleh jajaran Pemkot Denpasar," katanya.

Neeharika Singh juga mengapresiasi kultur sosial budaya yang ada di Kota Denpasar. Untuk itu, dia mengharapkan ke depannya pihak Pemerintah India dapat berkolaborasi dengan Pemkot Denpasar, terutama dalam bidang sosial dan budaya. (ant)

Pemkot Denpasar Utamakan Tata Kelola Penanganan Sampah



Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Forum Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar tentang penanganan sampah di Denpasar, Kamis (2/3/2023). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

PEMERINTAH Kota Denpasar tengah memfokuskan penanganan terhadap tata kelola sampah di ibu kota Provinsi Bali itu, agar semakin baik.

"Saat ini kita tengah berkonsentrasi pada permasalahan sampah. Pada akhir Maret nanti, rencananya tiga TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) akan dapat

dioperasikan," kata Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa dalam Rapat Forum Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar di Denpasar, Kamis.

Rapat yang digelar di Kantor Desa Tegal Kertha Denpasar itu, juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana serta jajaran organisasi

perangkat daerah terkait lainnya.

Ia menambahkan untuk tata kelola penanganan sampah secara detail akan dibahas dalam waktu dekat

Ia mengharapkan para perbekel (kepala desa/lurah) tetap selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dan segera mempersiapkan diri dengan skema penanganan sampah yang akan segera disusun.

"Melalui rapat ini, saya mohon agar perbekel dan lurah agar selalu membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan masyarakat maupun dengan OPD terkait, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan penanganan suatu peristiwa dapat dilakukan lebih cepat dan lebih komprehensif," ujarnya.

Pertemuan tersebut juga membahas soal persiapan kamtibmas menjelang Hari Nyepi Tahun Saka 1945 yang akan jatuh pada 22 Maret mendatang.

Sekda Kota Denpasar Alit Wiradana mendorong kesiapsiagaan desa/kelurahan di bawah naungan empat kecamatan di Kota Denpasar ditingkatkan agar prosesi Malam Pengerupukan berlangsung kondusif, aman, dan lancar.

"Hal ini dapat kita lakukan misalnya dengan pelibatan para linmas di tingkat desa/kelurahan dan juga petugas Satpol PP di tingkat kecamatan agar bisa melakukan pantauan terhadap lingkungan di wilayah masing-masing, sehingga prosesi Malam Pengerupukan nantinya dapat dilaksanakan dengan kondusif," kata dia.

Ketua Forum Perbekel/Lurah Kota Denpasar I Gede Wijaya Saputra menyatakan para perbekel dan lurah siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Arya Wibawa dan Sekda Alit Wiradana. (ant)

Pemkot Denpasar Gelar Vaksinasi Rabies Dari Rumah Ke Rumah Cegah Penularan

DINAS Pertanian (Distan) Kota Denpasar melaksanakan vaksinasi rabies dengan mendaftari sejumlah rumah warga sebagai upaya untuk mencegah penularan rabies di Ibu Kota Provinsi Bali itu.

"Vaksinasi ini digelar dari 6-17 Maret 2023, untuk mencapai kekebalan kelompok agar rabies tidak menyebar luas," kata Subkoordinator Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar Ida Ayu Made Sri Martini di Denpasar, Senin.

Sedangkan untuk hari ini pelaksanaan vaksinasi rabies dilaksanakan di Kelurahan Kesiman dan Desa Pemogan, Kota Denpasar yang merupakan wilayah prioritas satu.

Untuk di Lingkungan Abian Tubuh, Kelurahan Kesiman, telah



disuntikkan sebanyak 313 dosis vaksin rabies.

"Vaksinasi rabies digelar, karena terdapat kenaikan kasus anjing yang terkena rabies di berbagai daerah.

Pelaksanaan vaksinasi saat ini difokuskan di daerah prioritas satu, yakni Kelurahan Kesiman dan Desa Pemogan," ucapnya.

Sri Martini menambahkan bagi pemilik hewan, seperti anjing dan kucing, yang tidak sempat bertemu tim vaksinasi dari Dinas Pertanian, dapat langsung membawa hewan peliharaannya ke Dinas Pertanian Kota Denpasar.

Selain itu, juga dapat mendaftari Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) Denpasar untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi rabies. (ant)



Petugas dari Dinas Pertanian Kota Denpasar menyuntikkan vaksin anti rabies pada seekor anjing saat program vaksinasi rabies gratis di Denpasar, Bali, Senin (6/3/2023). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo.

Tim Gabungan Pemkot Denpasar Sidak Angkutan Umum



Tim gabungan Pemerintah Kota Denpasar saat melakukan sidak lalu lintas dan angkutan di kawasan Jalan Mahendradata, Denpasar, Kamis (9/3/2023). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

TIM Gabungan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri atas unsur TNI/Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kesbangpol dan Organda

melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap lalu lintas dan angkutan di kawasan Jalan Mahendradata, Denpasar.

Kadis Perhubungan Kota

Denpasar I Ketut Sriawan di Denpasar, Kamis, mengatakan sidak lalu lintas dan angkutan umum di jalan ini merupakan upaya berkelanjutan dalam menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas.

"Dengan demikian diharapkan ke depannya masyarakat atau pengguna jalan menjadi nyaman saat berkendara," ujarnya.

Dalam kegiatan sidak kali ini menindak 24 pemilik kendaraan di antaranya 17 pemilik kendaraan diganjar imbauan dan stiker, sedangkan tujuh lainnya yang merupakan pengendara kendaraan roda dua diganjar tilang oleh kepolisian.

"Pelanggaran didominasi oleh pelanggaran parkir. Untuk jenis kendaraan mobil barang sebanyak 12 kendaraan, mobil penumpang empat kendaraan dan satu bus," ujarnya.

Sedangkan tujuh pelanggaran lainnya yang merupakan pengendara sepeda motor, karena motor yang digunakan tidak sesuai dengan standar serta tidak melengkapi SIM ataupun STNK.

"Jadi secara umum dapat kami sampaikan bahwa masih banyak kita temukan kendaraan besar seperti mobil barang, bus dan kendaraan penumpang lainnya yang memarkir kendaraan di pinggir jalan, tentu ini sangat mengganggu pengendara lain," ucapnya.

Sriawan mengimbau seluruh pemilik kendaraan yang sampai diinapkan agar senantiasa menyiapkan tempat parkir sehingga tidak lagi parkir di pinggir jalan berhari-hari.

Tak hanya itu, pengendara juga diharapkan melengkapi surat-surat baik itu SIM dan STNK. Sehingga perjalanan berkendara menjadi aman, nyaman dan sesuai dengan aturan.

"Melalui penegakan kedisiplinan berlalu lintas di Kota Denpasar, kami mengajak seluruh pengendara untuk menjaga keindahan kenyamanan Kota Denpasar melalui ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan," ucap Sriawan. (ant)

Pemkab Badung Cairkan Dana BKK untuk Ringankan Beban Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali kembali menyalurkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk meringankan beban masyarakat dan beban pemerintah desa atau kelurahan di setiap wilayah kecamatan di wilayahnya.

"Kami menyalurkan BKK tahap II dengan menyasar dua desa di Kecamatan Kuta Utara yang memperoleh dana BKK sebesar Rp75,9 miliar dan Kecamatan Kuta Selatan yang diterima tiga desa dengan total Rp10,7 miliar," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam keterangan yang diterima, Rabu.

Ia mengatakan melalui penyaluran BKK itu Pemkab Badung berharap agar setiap desa dan kelurahan dapat terus berlomba dalam melakukan inovasi membangun wilayah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini.

"Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial,

ekonomi, serta lingkungan sehingga tidak mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan datang," kata dia.

Selain itu, menurut dia perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa/kelurahan dalam upaya penyediaan infrastruktur berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bupati Giri Prasta memberikan contoh, seperti Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, akan menjadi desa pariwisata yang menjadi pusat dari agrowisata, ekowisata, wisata kesehatan dan wisata budaya.

Ia mengatakan nantinya ketika ada wisatawan yang datang ke Desa Tibubeneng,



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memimpin safari penyaluran BKK Kabupaten Badung tahap II untuk Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan. ANTARA/HO-Pemkab Badung

pihaknya akan membuatkan penginapan di rumah warga yang kamarnya standar bintang 5 dan dikelola langsung oleh masyarakat, sehingga tamu yang akan menginap bisa tinggal di rumah masyarakat dan berbaur mempelajari budaya yang ada.

"Artinya tamu menginap mendapatkan fasilitas bintang lima dibayarkan kepada masyarakat,

sehingga masyarakat pribumi ini bisa menjadi tuan di rumah sendiri. Saya setuju sekali ketika ada investasi ke sini, silakan, tapi dengan satu catatan jangan sampai masyarakat termarginalkan," ungkap dia.

Selain BKK ia menambahkan bahwa di Kabupaten Badung akan ada Dana Insentif Desa (DID) yang kemungkinan di Kabupaten lain belum ada. (adv)

Pemkab Badung Lampau Target Penurunan Angka Stunting di Wilayahnya



Wabup Badung I Ketut Suiasa (tengah) memimpin Rakor Percepatan Penurunan Angka Stunting Tingkat Kabupaten Badung di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Puspem Badung, Rabu (1/3). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PENURUNAN angka stunting yang dilakukan di wilayah Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2022 telah melampaui target yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Bali.

"Target penurunan dari pemerintah pusat untuk stunting di angka delapan persen. Untuk di Provinsi Bali ditargetkan sebesar

tujuh persen. Sedangkan kami di Kabupaten Badung sendiri sudah mencapai di angka 6,6 persen," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Badung di Mangupura, Rabu.

Untuk tahun 2023, Pemkab Badung menargetkan angka stunting bisa ditekan hingga mencapai

angka 6 persen. Oleh karena itu Tim Percepatan Penurunan Stunting Badung bersama pihak terkait lainnya terus melaksanakan koordinasi secara intens untuk mengevaluasi terhadap capaian.

Wabup Ketut Suiasa menjelaskan pihaknya akan memberikan pendidikan dan pembinaan khususnya dalam tindakan berkeluarga bagi warga Kabupaten Badung yang akan melakukan pernikahan.

Hal itu karena menurutnya dalam menjalani kehidupan tangga masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan dalam rumah tangga secara umum, namun diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sehat.

Menurutnya, secara teknis pihaknya juga akan melakukan upaya-upaya inovasi digitalisasi dalam rangka penanganan stunting, seperti pendataan dan pola penanganan di dalam Inovasi Badung Bergairah.

"Persoalan Stunting perlu dicegah dari hulu, kedepannya kami akan membuat seperti adanya inovasi tim stunting yang diberi nama Badung Bergairah," tambah Wabup Ketut Suiasa.

Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Badung I Nyoman Gunarta mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan penurunan stunting dan terbukti tahun pada tahun 2022 dapat mencapai angka 6,6 persen.

"Padahal tahun 2021 angkanya sebesar 8,5 persen. Kami akan terus meningkatkan upaya penanganan stunting dengan menjalin koordinasi lintas sektor dan kewilayahan. Kemudian kami juga melakukan inovasi-inovasi untuk mempercepat pencapaian target," pungkas dia. (adv)

Pemkab Badung Dorong Kebijakan Satu Data Kependudukan

PEMKAB Badung, Bali mendorong implementasi kebijakan Satu Data Kependudukan yang diwujudkan seperti dengan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung.

“Disdukcapil Badung tidak hanya menata, mencatat dan menerbitkan dokumen kependudukan, akan tetapi juga menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat yang menjadi dasar rujukan bagi lembaga lainnya,” ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, kerja sama antara Disdukcapil Badung dengan 2 perangkat daerah dan 16 desa di Badung itu merupakan hal yang sangat penting karena sesuai dengan arahan Bupati Badung yakni membangun Badung dalam satu genggaman.

Menurutnya, kerja sama tersebut juga dinilai ini menjadi muara dari berbagai pelayanan publik yang dilakukan di masing-masing wilayah desa.

“Sekarang ini kami dihadapkan pada kondisi yang sangat multi-dimensional terlebih kami merupakan daerah pariwisata, tentu desa kami menjadi desa internasional. Perubahan administrasi kependudukan sangat cepat sekali,” kata dia.

Sekda Adi Arnawa menambahkan pihaknya mendorong implementasi dari perjanjian kerja sama akses data administrasi kependudukan karena perangkat daerah dan desa diberikan peluang untuk mengakses data yang disajikan Disdukcapil untuk mewujudkan kebijakan satu data kependudukan.

“Ini adalah kebijakan untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, terpadu,



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah) saat menghadiri acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan data kependudukan. ANTARA/HO-Pemkab Badung

dan dapat diakses oleh pengguna data,” tambah dia.

Sementara itu Kepala Dinas Dukcapil Badung A.A Ngurah Arimbawa mengatakan Dukcapil Badung akan terus berupaya mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat yang diimplementasikan ke dalam sembilan misi pembangunan.

Pihaknya juga memiliki misi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

“Kami juga berupaya untuk dapat meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi,” pungkask dia. (adv)

Pemkab Badung Apresiasi Polresta Denpasar Tangani Kasus Narkotika



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) menyerahkan piagam penghargaan kepada Polresta Denpasar yang diterima langsung Kapolresta Denpasar Kombes. Pol Bambang Yugo Pamungkas di Kantor Polresta Denpasar, Jumat (3/3). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali menyerahkan piagam penghargaan kepada Polresta Denpasar yang diterima langsung oleh Kapolresta Denpasar Kombes. Pol Bambang Yugo Pamungkas atas prestasinya dalam pengungkapan tindak

pidana narkotika di wilayah Badung.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi maupun dukungan secara penuh terhadap tindakan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Badung yang dilakukan

jajaran kepolisian,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa di Denpasar, Jumat.

Ia mengatakan penyerahan penghargaan dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta kepada anggota kepolisian Polresta Denpasar, melalui kepemimpinan Kombes. Pol Bambang Yugo Pamungkas itu dilakukan sebagai wujud apresiasi kepada seluruh jajaran Polresta Denpasar yang selama ini dinilai sudah berhasil menangani permasalahan narkotika di wilayah Badung.

Pengungkapan kasus kriminal termasuk kasus narkotika menurut Sekda Adi Arnawa juga akan berdampak positif terhadap sektor pariwisata yang selama ini telah menjadi sektor utama di Kabupaten Badung.

“Mudah-mudahan hal ini akan terus dilanjutkan karena kami menginginkan adanya satu kepastian bagi semuanya, dalam rangka pelaksanaan penegakan

hukum, sekaligus akan berdampak kepada kenyamanan daripada pariwisata,” kata Sekda Adi Arnawa.

Sementara itu Kapolresta Denpasar Kombes. Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas penghargaan yang diberikan kepada Polresta Denpasar, utamanya di Satuan Res Narkoba.

Jajaran Polresta Denpasar menurut dia juga akan tetap bekerja keras, utamanya menyelamatkan generasi muda dan menyelamatkan aset-aset bangsa terutama dari ancaman narkoba serta menjaga sektor pariwisata di Bali agar semakin baik di mata dunia internasional karena bebas dari narkoba.

“Memang hal ini menjadi tanggung jawab kami bersama, dimana kebijakan Kepala Daerah di Kabupaten Badung, kita dukung terutama terkait pengembangan pariwisata,” tambah dia. (adv)

Pemkab Badung Hibahkan Gedung ke Kejati Bali Simpan Aset Rampasan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Badung menghibahkan sebuah gedung kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali untuk dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan aset atau barang rampasan dari kejaksaan di daerah itu.

"Kami berharap gedung ini dapat dipergunakan untuk menyimpan aset berupa barang bukti dari perkara tindak pidana yang ditangani Kejaksaan Negeri di wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Bali," ujar Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat peresmian gedung tersebut di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan keberadaan gedung penyimpanan aset itu merupakan wujud komitmen Pemkab Badung dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar pro law enforcement,

Prinsip dasar pro law enforcement, adalah kebijakan pembangunan yang senantiasa patuh dan taat akan peraturan perundang-undan-

gan yang berlaku serta mendukung upaya penegakan hukum.

Giri Prasta mengatakan pembangunan gedung tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 sekitar Rp9,4 miliar dan nantinya dapat digunakan untuk menyimpan barang bukti terutama kendaraan dengan daya tampung sekitar 1.000 unit sepeda motor dan 100 unit mobil.

"Pemerintah dan masyarakat Badung sangat mendukung pembangunan gedung untuk pengelolaan barang rampasan dari Kejati Bali. Ini merupakan yang terbesar di Indonesia dan semoga dapat membantu upaya penegakan hukum di wilayah Bali, terutama di Badung," kata dia.

Menurut dia, pembangunan gedung itu juga merupakan wujud komitmen Pemkab Badung dalam mendukung kejaksaan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutamanya dalam hal mendapatkan keadilan



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (ketiga kanan) bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Ade Sutiawarman (kedua kiri) saat peresmian gedung bantuan hibah untuk penyimpanan aset atau barang rampasan dari Kejaksaan Tinggi Bali, di Badung, Jumat (3/3/2023). ANTARA/HO-Pemkab Badung

sebagai wujud persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Giri Prasta menambahkan pihaknya wajib untuk dekat dan menjalin komunikasi dan bersinergi dengan kejaksaan terkait dengan pendapat hukum ataupun perlindungan hukum agar masyarakat Bali mendapatkan pelayanan, perlindungan dan

bantuan hukum yang memadai.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ade Sutiawarman mengatakan pemberian gedung dari Pemkab Badung untuk pengelolaan aset dan barang rampasan itu merupakan yang pertama di Bali yang dibangun secara khusus dan terpisah dari kantor kejaksaan. (adv)

Pemilihan Duta Anak, Upaya Pemkab Badung Jadi Kabupaten Layak Anak



Pemilihan Duta Anak di Kabupaten Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali menyelenggarakan Pemilihan Duta Anak 2023 sebagai salah satu upaya untuk mendorong wilayah itu menjadi Kabupaten Layak Anak.

"Kami berharap dengan kegiatan ini bisa sebagai pemicu untuk menjadikan Badung sebagai kabupaten yang layak anak," ujar Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Badung Nyoman Gunarta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan Duta Anak yang terpilih pada kegiatan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya terutama untuk selalu

memberikan suatu kreatifitas, inovasi, dalam mengikuti perkembangan peradaban.

"Sehingga harapannya, anak-anak di Kabupaten Badung bisa menjadi anak-anak yang maju, namun tetap dalam jalur peradaban yang terkini tanpa meninggalkan norma-norma yang ada," kata dia.

Pemilihan Duta Anak Kabupaten Badung tahun 2023 itu mengambil tema "Kumarrotama Perthiwi Bhakti" atau Kemilau Karya Anak Bangsa.

Nyoman Gunarta menjelaskan tema Kumarrotama Perthiwi Bhakti itu menjadi wujud bahwa anak-anak Badung dapat merencanakan fungsi sebagai pelopor dan pelapor di dalam lingkungan.

Pada kegiatan itu, para peserta yang terpilih akan mewakili Kabupaten Badung, dalam Mimbar Anak Bali tahun 2023.

"Kepada duta anak Badung yang terpilih, kami berharap

nantinya mereka betul-betul bisa menjadi kontributor yang aktif untuk menyuarakan aspirasi dari anak-anak Badung," tambah dia.

Sementara itu Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menambahkan anak-anak yang menjadi Duta Kabupaten Badung diharapkan mampu untuk menampilkan potensi-potensi dan kompetensinya maupun kemampuan yang mereka miliki di dalam penilaian ke tingkat Provinsi Bali.

"Kami yakin dan optimis bahwa anak-anak kita benar-benar kreatif, inovatif, dalam meraih kompetensi. Dimana mereka siap untuk mewujudkan kemandirian mereka dalam meraih masa depan, terutamanya dari segi fisik maupun mentalnya," tambah dia.

Ia juga berpesan kepada anak-anak agar terus berlatih untuk mencapai prestasi secara maksimal, sebagaimana yang telah dilakukan oleh duta anak sebelumnya. (adv)

Pemkab Magelang Pelajari Tata Kelola Keuangan Dari Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, melakukan kunjungan studi komparasi ke Kabupaten Badung, Bali, untuk mempelajari tata kelola keuangan pemerintah daerah.

"Kami bersama jajaran mengunjungi Badung dalam rangka studi komparasi serta berbagi informasi dan bertukar pengalaman terkait dengan tata kelola keuangan pemerintah daerah, mulai dari penganggaran, pengelolaan pendapatan sampai dengan pelaporan keuangan," ujar Bupati Magelang Zaenal Arifin dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Selasa.

Pada kunjungan tersebut, rombongan Pemkab Magelang langsung diterima oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang memaparkan sejumlah program dan strategi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Badung.

Sejumlah program yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, di

antaranya adalah pembangunan di Kabupaten Badung yang berlandaskan rencana pembangunan jangka panjang.

Bupati Giri Prasta menjelaskan bahwa rencana pembangunan jangka panjang itu selanjutnya diturunkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk menerjemahkan semua program kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sehingga akan memudahkan dalam penyusunan RAPBD.

"Pada bulan Januari kami melaksanakan musrenbang desa, pada bulan Februari musrenbang kecamatan, dan pada bulan Maret kami melaksanakan musrenbang daerah," kata dia.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah selalu mengedepankan penegakan hukum sehingga Kabupaten Badung selama 8 tahun berturut-



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri) menerima kunjungan kerja Bupati Magelang Zaenal Arifin (kanan). ANTARA/HO-Pemkab Badung

turut dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Kami ingin menjadikan Kabupaten Badung sebagai salah satu role model atau percontohan di tingkat nasional dalam bidang tata kelola pemerintahan maupun dalam bidang tata kelola keuangan pemerintah daerah,"

kata Bupati Giri Prasta.

Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta meyakini ada banyak kesamaan karakteristik antara Pemkab Badung dan Pemkab Magelang sehingga melalui pertemuan ini bisa mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak. (adv)

Pemkab Badung Dorong BUMDes Terus Majukan Potensi Desa



Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa. ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayahnya terus menggalang dan mengembangkan potensi desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami mendorong BUMDes mengubah paradigma dan pola pikir agar tidak hanya bergerak

di bidang simpan pinjam, namun mulai mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Kami ingin semuanya bergerak demi kesejahteraan masyarakat," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan pendapatan Pemkab Badung yang semakin meningkat dan berkembang, ber-

implikasi pada cukup banyaknya dana bagi hasil pajak dan retribusi ke desa.

"Hal ini harus benar-benar digerakkan oleh desa untuk mengoptimalkan BUMDes dalam rangka menggali potensi, meningkatkan pendapatan desa, serta kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan pihaknya juga akan terus melakukan berbagai upaya guna mengoptimalkan pengelolaan BUMDes seperti dengan melakukan rakor bersama jajaran BUMDes yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung.

Menurutnya, upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah meningkatkan sumber daya manusia dan kapasitas pengelola BUMDes.

"Kami harapkan kegiatan seperti ini terus dilakukan secara berkala, bila perlu ada studi band-

ing ke daerah yang memang sukses, sehingga ada satu perbandingan yang bisa diperoleh untuk menambah informasi dalam upaya menggerakkan BUMDes di Badung," ungkap dia.

Kepala Dinas PMD Badung Komang Budhi Argawa menambahkan pihaknya berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaanya.

Selain itu pihaknya juga mendorong BUMDes agar dapat meningkatkan pelayanan guna merangsang tumbuhnya kegiatan produktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal sebagai produk unggulan desa.

"Pengelolaan BUMDes harus ditingkatkan untuk pengembangan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa," ujarnya. (adv)

Pemkab Badung Minta Kelurahan Bentuk Tim Untuk Cegah Penyebaran Rabies

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali memerintahkan jajaran pemerintahan kelurahan dan desa adat untuk membentuk tim siaga guna mengendalikan penyakit menular dari hewan seperti rabies

"Kami sudah perintahkan kelurahan dan desa adat untuk membentuk tim siaga dalam pengendalian penyakit menular dari hewan yang akan bisa dianggarkan di desa dan kelurahan di Kabupaten Badung," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies di Mangupura, Selasa.

Pemkab Badung akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya terkait pengendalian terhadap risiko penyakit rabies di daerah itu.

Upaya antisipasi itu tidak hanya dilakukan Pemkab

Badung namun bersama dengan PHDI Badung dan Majelis MDA Kabupaten Badung yang telah sepakat agar di setiap desa adat juga ada sosialisasi tentang pengendalian rabies.

Menurut Wabup Suiasa, langkah antisipasi harus dilakukan sejak awal sehingga kondisi perkembangan penyakit rabies di daerah itu sedini mungkin dapat diantisipasi dan terus ditekan.

"Sudah ada kejadian kasus-kasus rabies yang waktu ini terjadi seperti di wilayah Legian dan di tempat lainnya yang sudah kami tangani dengan baik atas sinergi dengan berbagai pihak," kata dia.

Ia menjelaskan kasus rabies merupakan isu sensitif, khususnya di bidang kepariwisataan yang menjadi sektor utama di Kabupaten Badung dan berisiko menghambat pertumbuhan dan



Wabup Badung I Ketut Suiasa saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies. ANTARA/HO-Pemkab Badung

perkembangan kepariwisataan.

Selain itu, kata dia, penanganan rabies dinilai penting karena hewan liar penyebab rabies dapat mengancam jiwa manusia.

"Mudah-mudahan di Badung

kasus penularan rabies ini bisa ditekan seminimal mungkin karena selain mengancam kesehatan juga berisiko menimbulkan isu negatif dan menurunkan pariwisata yang ada di Badung," kata Wabup Ketut Suiasa. (adv)

Disdukcapil Badung Dorong Semua Desa Jadi Desa Cerdas



Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Arimbawa. FOTO ANTARA/HO-Pemkab Badung

DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, Provinsi Bali mendorong semua desa yang ada di wilayah itu untuk menjadi Desa Cerdas.

"Kami saat ini terus mendorong agar setiap desa/kelurahan di Badung, untuk bisa

bertransformasi menjadi desa cerdas. Yang mana, salah satu cirinya adalah, pelayanan administrasi yang dilakukan sudah berbasis digital," kata Kepala Dinas Dukcapil Badung, Anak Agung Ngurah Arimbawa dalam taklimat media yang diterima di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan upaya tersebut sudah dilakukan Disdukcapil sejak tahun 2022 yang dilakukan secara bertahap dengan mendorong desa/kelurahan untuk mengarah ke digital.

Meski terus mendorong transformasi digital, pihaknya juga tetap melihat seperti apa kesiapan dari masing-masing desa, baik dari segi sarana dan prasarana, dari sisi sumber daya manusia serta komitmen dari jajaran pimpinan pemerintah desa.

Ia menjelaskan saat ini di Badung sudah ada sebanyak 52 desa yang menuju desa cerdas dari total 62 desa yang ada, dan tinggal 10 desa/kelurahan yang belum menerapkan.

Upaya dalam mewujudkan desa cerdas di Badung itu saat ini juga telah didukung oleh kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang memberikan fasilitas jaringan internet gratis dari ujung utara sampai ujung

selatan wilayah Badung.

"Kami menindaklanjuti visi misi Bupati Badung, dengan merancang inovasi yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Yakni pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang langsung bisa dilakukan di Desa," katanya.

Inovasi lain yang ada di desa yaitu Gapura Desa yang di dalamnya terdapat Telunjuk Sakti Desa, terdapat ID Digital, fitur Penduduk non-permanen serta fitur Laporan Kematian penduduk.

"Ada empat fitur disana, bagaimana ini nantinya bisa berkelanjutan dan bisa memberikan manfaat bagi desa," katanya.

Selain itu, guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Disdukcapil Badung juga memiliki aplikasi 'Akudicari' yang dapat diakses masyarakat dari lokasi manapun. (adv)

Dinas Kominfo Kabupaten Gianyar Raih Juara 1 Foto Terbaik Nasional

DINAS Kominfo Kabupaten Gianyar meraih juara 1 Kategori Foto Terbaik Media Center se-Indonesia melalui foto berjudul "Penari Sisywa" yang digelar Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Kominfo RI.

"Semoga dengan prestasi yang didapat menjadi pengungkit untuk terus berkontribusi membangun komunikasi publik yang sehat dan mencerahkan. Presiden Jokowi juga memberikan perhatian khusus pada portal Infopublik Kementerian Kominfo, dengan adanya Inpres dalam pengelolaan media center di daerah," kata staf khusus Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti, saat menyerahkan penghargaan ke Kominfo Gianyar, melalui siaran pers Diskominfo Gianyar, Kamis.

"Harapan saya seluruh media center provinsi/kabupaten/kota lebih aktif dalam mengirimkan berita dan foto. Sebuah berita

atau foto merupakan salah satu kekayaan diri sendiri," ujarnya.

Pada Desember 2022 Media Center Diskominfo Kabupaten Gianyar mengirimkan sebuah foto dengan judul "Penari Sisywa" untuk mengikuti lomba foto dan akhirnya meraih foto terbaik dari 139 media center provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.

Di sela-sela penganugerahan, seorang dewan juri menjelaskan foto Penari Sisywa layak masuk nominasi karena memenuhi semua kriteria sebagai foto jurnalistik, seperti komposisi, keutuhan, pencahayaan, tingkat kesulitan serta sudut (angle) pengambilan yang tepat.

"Saya berharap ke depan agar Media Center Diskominfo Kabupaten Gianyar lebih meningkatkan kontribusi dalam mengirimkan artikel/berita dan foto ke portal Infopublik Kemenkominfo dalam upaya penyebaran informasi," ujar Kepala Dinas Kominfo Kabu-



Staf khusus Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti menyerahkan penghargaan ke Kominfo Gianyar karena meraih juara 1 Kategori Foto Terbaik Media Center se-Indonesia melalui foto berjudul "Penari Sisywa" (ANTARA/HO-Humas Gianyar)

paten Gianyar Anak Agung Gde Raka Suryadiputra.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi dari Kementerian Kominfo kepada pengelola media center daerah atas kontribusi aktif mengirimkan konten berita dalam portal

berita Info Publik selama tahun 2022. Acara ini dihadiri Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong didampingi Direktur Pengelola Media Nursodik Gunarjo, dan Staf Khusus Menkominfo Rosarita Niken Widiastuti. (ant)

Pemkab Tabanan Luncurkan Aplikasi "Silpa" Tingkatkan Layanan Publik



Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat meluncurkan aplikasi Silpa di Kabupaten Tabanan, Bali, Rabu (1/3/2023). (ANTARA/HO-Pemkab Tabanan)

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan, Bali, meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Pajak (Silpa) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) daring sebagai wujud optimalisasi lini pelayanan publik.

"Peluncuran aplikasi dengan konsep digital ini kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan peluncuran aplikasi berbasis digital ini, kami meyakini akan mampu memberikan keuntungan bagi para

wajib pajak ataupun masyarakat karena tidak lagi terdapat banyak alur layanan," kata Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya di Tabanan, Bali, Rabu.

Sanjaya mengatakan sebelum adanya aplikasi Silpa, terdapat sekitar delapan alur layanan yang memerlukan proses panjang. Namun, kini dengan adanya Silpa, maka hanya diperlukan lima alur layanan dengan proses cukup singkat.

Dia pun berharap aplikasi Silpa dapat mempermudah dan mempercepat layanan kepada wajib pajak dan masyarakat dengan teknologi digital.

"Sistem digitalisasi di Kabupaten Tabanan ini sudah kami tunggu-tunggu dari jauh hari, karena ini merupakan amanah dari semua pihak," tambahnya.

Memasuki era digitalisasi, lanjutnya, sistem kerja pemerintah daerah harus selalu berbenah.

Apalagi, Tabanan sudah menancangkan smart city dengan desa-desa di Tabanan yang hampir seluruhnya mempunyai sistem informasi digital.

"Kalau perangkat daerah tidak memiliki sistem informasi digital dan sistem kerja digital, maka kita ketinggalan. Ini sangat tidak baik. Artinya, birokrasi saat ini harus efektif dan efisien," ungkapnya.

Dia menambahkan dalam proses menuju sistem digitalisasi di Pemkab Tabanan, saat ini masih banyak hal yang harus dioptimalkan.

"Komitmen bersama antar-perangkat daerah harus ditunjukkan melalui kerja kolaborasi dan bergotong-royong. Ayo bangkit bersatu membangun Tabanan era baru ini. Kalau bukan kami yang memulai, siapa lagi yang akan membangun Kabupaten Tabanan ini," ujar Gede Sanjaya. (ant)

Pemkab Konawe Utara Pelajari Layanan Publik Pemkab Badung

ROMBONGAN Pemkab Konawe Utara, Sulawesi Tenggara mempelajari layanan publik yang diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung, Bali.

"Kami sangat kagum dan menilai Kabupaten Badung ini sangat cocok menjadi percontohan. Dari hasil studi tiru kami ini nantinya akan disampaikan langsung kepada Bupati Konawe Utara," ujar Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan pihaknya berharap setelah kunjungan studi tiru ke Kabupaten Badung itu nantinya Mal Pelayanan Publik yang akan dibangun di Kabupaten Konawe Utara nantinya dapat segera terealisasi.

"Mudah-mudahan di tahun 2023 atau paling lambat 2024, seperti apa yang ada di Kabupaten Badung ini bisa terlaksana di daerah kami," kata dia.

Wabup Abuhaera juga berharap agar setelah kunjungan studi tiru itu nantinya Pemkab Badung juga tetap dapat memberikan motivasi kepada kami pihaknya, agar dapat memberikan pemerataan pelayanan MPP di seluruh Indonesia.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan menjelaskan pada prinsipnya Kabupaten Badung siap membantu Kabupaten Konawe Utara dalam mengembangkan MPP.

"Bahkan kami siap mendukung segala sesuatu, termasuk aplikasi yang kami miliki. Mudah-mudahan ke depannya MPP Konawe Utara bisa maju dan segera terwujud," tambah dia.

Ia mengungkapkan Kabupaten Badung telah ditunjuk oleh Kementerian PANRB sebagai salah satu pilot project atau percontohan MPP digital.



Kunjungan rombongan Pemkab Konawe Utara untuk pelajari layanan publik di MPP Kabupaten Badung, Bali. ANTARA/HO-Pemkab Badung.

han MPP digital.

Meskipun begitu menurut Agus Aryawan pihaknya akan tetap melakukan inovasi, pengembangan, dan melengkapi instansi yang prioritas akan membuka layanan. Tentunya sesuai dengan ketersediaan ruangan.

"Program kami kedepannya bagaimana mendigitalisasi semua pelayanan, tidak hanya secara konvensional tetapi juga pelayanan digital. Sehingga semua persiapan termasuk DED dalam rangka mewujudkan MPP Digital sudah selesai," pungkask dia. (adv)

Diskerpus Badung Tingkatkan Literasi ke Kalangan Anak



Pemilihan Duta Literasi Anak untuk jenjang SD dan SMP di Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

DINAS Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) Kabupaten Badung, Bali berupaya meningkatkan angka literasi khususnya kepada generasi muda melalui kegiatan Pemilihan Duta Literasi Anak untuk jenjang SD dan SMP.

"Untuk membangun literasi

membaca yang lebih baik, maka literasi harus dimulai sejak dini. Melalui pemilihan ini paling tidak peserta akan sangat membantu kami dalam memajukan literasi membaca anak di tingkat SD dan SMP," ujar Kepala Diskerpus Kabupaten Badung Ni Wayan Kristiani dalam keteran-

gannya di Mangupura, Jumat.

Dari hasil pemilihan ini, pihaknya juga menginginkan Duta Literasi Anak bisa membantu memajukan dan menyuarakan perpustakaan di sekolah-sekolah.

"Selain itu, upaya ini juga sebagai upaya kami bersama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Badung," kata dia.

Pada kegiatan selama dua hari ini, para peserta menjalani tahapan seleksi wawancara dan presentasi esai maupun resensi buku yang telah ditulis oleh para peserta.

Wayan Kristiani menjelaskan para peserta yang mengikuti tahapan seleksi wawancara dan presentasi merupakan 10 besar di masing-masing jenjang, baik SD maupun SMP.

"Dalam pemilihan ini, kami

syaratkan peserta mengumpulkan esai dan resensi buku yang telah dibaca. Kemudian hari ini kita lanjutkan dengan seleksi wawancara dan presentasi apa yang sudah mereka buat," ungkap dia.

Salah satu juri seleksi itu, Ni Komang Sri Wardhani, menambahkan Pemilihan Duta Literasi Anak dinilai menjadi salah satu cara untuk meningkatkan siswa dan berliterasi di sekolah yang saat ini cenderung mengalami penurunan.

"Kami ingin anak-anak kami terutama di SD dan SMP mulai bangkit minat bacanya menjadi lebih tinggi. Baik itu baca di kelas maupun di perpustakaan. Karena memang selama ini anak-anak masih kurang berkunjung ke perpustakaan. Kalau kami tidak buat jadwal tertentu, mereka jarang sekali ke perpustakaan," tambah dia (adv)

Bupati Sang Nyoman Sedana Arta Lantik 94 Pejabat di Lingkungan Pemkab Bangli

BUPATI Bangli Sang Nyoman Sedana Arta melantik 94 pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten setempat yang terdiri atas 92 orang pejabat fungsional dan dua orang pejabat struktural.

Pada kesempatan itu juga menyerahkan 55 SK pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu untuk mengemban tugas dengan baik. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diperhatikan dan dipahami adalah tugas pokok dan fungsi masing-masing,” kata Bupati Bangli saat pelantikan di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli, Kamis.

Ia juga meminta kepada mereka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik, kemudian selalu memperhatikan prinsip-prinsip manajemen, yaitu melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat,

pengawasan yang ketat, dan memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan taat pada norma-norma yang ada.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tadi serta untuk menghindari adanya pekerjaan yang tumpang-tindih, dia berharap agar selalu melaksanakan koordinasi dan kerja sama yang baik antarrekan kerja ataupun instansi terkait.

Dengan demikian, lanjut Bupati Sedana Arta, akan dapat memberikan pelayanan yang secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat dan selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangli secara keseluruhan dalam upaya mewujudkan visi dan menjalankan misi Kabupaten Bangli.

Dalam pelantikan tersebut, dihadiri Asisten III Setda Kabupaten Bangli, Staf Ahli Bupati,



Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta melantik 94 pejabat. ANTARA/HO-Humas Pemkab Bangli

Kepala BKDPSDM Kabupaten Bangli, dan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bangli.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Bangli I Made Mahindra Putra mengatakan bahwa pelantikan 94 pejabat

dan penyerahan SK pengangkatan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. **(ant)**

Basarnas dan Pemkab Klungkung Perkuat Tim SAR di Nusa Penida



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta (tengah baju biru) berpose bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bali Gede Darmada, beserta jajaran di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, Bali, Jumat (3/3/2023). ANTARA/HO-Humas Basarnas Bali

KANTOR Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung memperkuat tim SAR (Search and Rescue) yang ada di Nusa Penida untuk mendukung keselamatan wisatawan yang berkunjung ke daerah itu.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Kepala Kantor Basarnas Bali Gede Darmada dan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di ruang rapat Kantor Bupati, Jumat.

Pada kesempatan tersebut pihak Basarnas Bali meminta

dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Klungkung melalui BPBD terkait rencana penyelenggaraan Pelatihan Potensi SAR di Nusa Penida yang ditargetkan menghimpun 50 peserta yang akan dilatih secara khusus.

Selain itu, Gede Darmada juga menyampaikan rencana Basarnas Bali untuk membangun shelter kendaraan operasional yang digunakan untuk keperluan mobilisasi khususnya dalam operasi SAR di sekitar wilayah Nusa Penida.

Menurut Darmada penanganan kondisi membahayakan manusia di Nusa Penida kerap kali terjadi dan korbannya didominasi oleh warga negara asing. Karena itu, diperlukan perhatian lebih terutama kepedulian dari masyarakat setempat dan kesiapsiagaan SAR yang ada di daerah tersebut.

Sementara itu, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sangat

mendukung langkah-langkah yang dilakukan Basarnas untuk kesiapsiagaan SAR di Nusa Penida, mengingat saat ini daerah tersebut menjadi tujuan wisata favorit bagi wisatawan lokal ataupun mancanegara.

“Dari data kami memang wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida hanya 10 persennya saja melakukan aktivitas berenang di pantai, namun resikoyalah yang cukup tinggi,” kata dia.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta juga mengutarakan niatnya untuk membangun One Gate One Destination, dimana akan terintegrasi seluruh stakeholder terkait, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan Basarnas Bali.

Kehadiran tim SAR, kata Suwirta sangat diperlukan untuk memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan para wisatawan yang berkunjung ke daerah Nusa Penida. **(ant)**

Disbud Buleleng Gandeng Undiksha Dalam Melestarikan Seni Budaya

DINAS Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Buleleng, Bali menggandeng Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dalam upaya pelestarian seni budaya yang menjadi spirit pengembangan bidang kepariwisataan Pulau Dewata.

"Temanya 'Ganesha Art Festival' pada kesempatan kali ini. Kami rutin melaksanakan pelak apresiasi seni dipusatkan di Taman Bung Karno di wilayah Kelurahan Sukasada, salah satunya melibatkan peran PTN," kata Kepala Bidang Adat dan Tradisi Disbud Buleleng Gede Angga Prasaja, Minggu.

Ia mengatakan, kegiatan apresiasi seni dilakukan sebagai upaya implementasi dari perguruan tinggi yang ikut serta mendukung program pemerintah dalam mengajekkan tradisi dan budaya Bali khususnya di Kabupaten Buleleng.

Kegiatan itu sekaligus sebagai upaya penggalan

potensi minat dan bakat di bidang kesenian daerah dari generasi muda (yowana) sehingga kemampuan tersebut dapat digunakan pada kegiatan sehari-hari di masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pelestarian tradisi, seni, adat dan budaya tidak bisa dilaksanakan sendiri, maka dari itu perlu adanya sinergi dari berbagai pihak dalam pelestarian dengan tidak lupa mengajak para generasi muda ikut andil di dalamnya.

"Semoga dengan sinergi ini kita dapat membangkitkan dan melestarikan seni budaya, adat dan tradisi yang ada di Kabupaten Buleleng, yang khas dibandingkan daerah lainnya di Bali," ujar dia.

Selain itu, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama Undiksha Made Yasa mengatakan kegiatan apresiasi seni di samping menggali potensi minat dan bakat mahasiswa di



Pemantasan salah satu lomba tari pada kegiatan Ganesha Art Festival di Taman Bung Karno, Kelurahan Sukasada Kabupaten Buleleng. ANTARA/Kominfosanti Buleleng

bidang kesenian daerah juga sebagai bentuk pelestarian budaya di Kabupaten Buleleng.

Yasa juga memaparkan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya perhelatannya mencakup di Bali saja, namun akan dicanangkan merambah ke tingkat nasional namun dengan

konsep pelaksanaan yang berbeda.

"Jadi, kedepannya kita ingin seni budaya ini dikenal pada kanvas nasional bahkan internasional, tidak hanya di Bali saja sehingga dapat dikenal khalayak ramai," ungkap dia. (ant)

Desa di Kabupaten Jembrana Kerja Sama Dengan BPJS Ketenagakerjaan



Pemkab Jembrana bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial pekerja rentan di setiap desa, Rabu (8/3).

PEMERINTAH desa di Kabupaten Jembrana, Bali menandatangani kerjasama jaminan sosial bagi pekerja rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk tiap desa berjumlah 10 orang yang mendapatkan jaminan sosial ini. Sehingga dari 41 desa di Jembrana, ada 410 orang," kata Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang

menghadiri penandatanganan kerjasama tersebut di Negara, Rabu.

Ia mengatakan, masyarakat yang masuk pekerja rentan adalah pekerja yang tidak menerima upah dari perusahaan seperti nelayan, petani, tukang ojek, buruh harian, tukang mandiri, pedagang kaki lima dan lain-lain.

Menurut dia, premi jaminan sosial sebesar Rp16.800 per bulan terhadap 410 pekerja rentan ini akan ditanggung pemerintah.

"Jumlahnya akan kami tambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Ini pertama kali di Bali, ada jaminan untuk pekerja rentan yang ditanggung pemerintah," katanya.

Kepala BP Jamsostek Cabang Bali Opik Taufik mem-

benarkan, program seperti ini merupakan yang pertama di Bali.

Ia berharap, jumlah warga pekerja rentan yang ditanggung program ini akan terus bertambah, karena di desa-desa banyak pekerja yang masuk kategori tersebut.

Sedangkan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Nusa Tenggara Dan Papua Kuncoro Budi Winarno yang juga hadir mengatakan, seluruh pekerja memiliki resiko sehingga sudah semestinya memiliki jaminan sosial.

"Pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan lewat jaminan sosial. Itulah yang dilakukan Pemkab Jembrana," katanya seraya berharap, jumlah pekerja rentan yang ditanggung program ini akan terus bertambah. (ant)

BI Bali Minta Pemda Cegah Inflasi Saat Nyepi dan Ramadhan

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mengajak pemerintah kabupaten/kota dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di provinsi setempat untuk mewaspadai tekanan inflasi jelang bulan Ramadhan dan Hari Suci Nyepi pada Maret 2023.

"Beberapa risiko yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kenaikan inflasi antara lain kenaikan permintaan bahan makanan dan makanan jadi menjelang Ramadhan dan Hari Nyepi," kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Sabtu.

Selain itu kenaikan harga BBM non-subsidi (Pertamax, Pertamax Plus) per 1 Maret 2023 yang berpotensi menyebabkan dampak langsung dan lanjutan terhadap inflasi, serta curah hujan yang masih tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi hortikultura.

"Sebaliknya, peningkatan pasokan beras oleh Bulog dan mulainya musim panen padi pada Maret 2023 diprakirakan menurunkan tekanan kenaikan harga beras," ujarnya.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali (Denpasar dan Singaraja) pada Februari 2023 sebesar 0,07 persen (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya (0,66 persen mtm) dan lebih rendah dari inflasi Nasional (0,16 perse, mtm).

Penurunan inflasi Februari 2023 tidak terlepas dari pengaruh positif respons kebijakan moneter Bank Indonesia dan sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Namun demikian, inflasi secara tahunan masih cukup tinggi sebesar 6,35 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan



Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar. ANTARA/Ni Luh Rhismawati.

inflasi bulan sebelumnya 5,81 persen (yoy) akibat pengaruh "base effect" periode yang sama tahun sebelumnya.

Trisno menambahkan, berdasarkan komoditasnya, terjadinya inflasi pada Februari 2023 disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas beras, bahan bakar rumah tangga (gas

LPG), bawang merah, dan cabai merah.

Kenaikan harga beras karena terbatasnya pasokan gabah dan belum masuknya masa panen padi, sedangkan kenaikan harga gas LPG disebabkan oleh pembatasan pembelian gas LPG 3 kg dan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET). (ant)

PLN Bali Tetap Alirkan Listrik Selama Nyepi, Kecuali di Nusa Penida

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali menyatakan tetap akan mengalirkan listrik selama perayaan Nyepi, kecuali di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

Manager Komunikasi PLN UID Bali I Made Arya, di Denpasar, Jumat, menyatakan pada saat Nyepi pelayanan PLN tidak ada yang berbeda.

"Cuma pelayanan untuk penanganan gangguan yang tidak bisa langsung menangani gangguan ke lapangan. Jadi, PLN tetap tidak mematikan atau memadamkan aliran listriknya, kecuali di Nusa Penida," kata dia pula.

Made Arya mengatakan khusus untuk wilayah di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali pada saat Nyepi tanggal 22 Maret 2023 dari pukul 08.00 WITA sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 pukul 04.00 WITA sudah nyala kembali.

Alasan pemadaman untuk

wilayah Nusa Penida dikarenakan di wilayah itu ada pembangkit listrik yang berpotensi menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu kenyamanan umat Hindu selama perayaan Nyepi.

Arya menyatakan pemadaman tersebut sudah disepakati bersama oleh pemanngku kepentingan seperti Camat Nusa Penida, Kapolsek Nusa Penida, dan majelis desa

adat setempat.

Selain itu, Made Arya mengimbau kepada masyarakat yang ingin memperbaiki jaringan kelistrikan agar segera membuat laporan kepada petugas atau kantor PLN terdekat untuk segera

diperbaiki sebelum perayaan hari raya Nyepi berlangsung.

"Mumpung masih ada waktu ya mungkin ada potensi terjadi gangguan di lingkungan sekitar mungkin bisa dilaporkan ke tim kami, sehingga gangguan-

nya tidak terjadi pada saat hari raya Nyepi," katanya pula.

Dia mengatakan PLN akan tetap melayani permintaan perbaikan jaringan hanya yang dikategorikan sangat mendesak dan urgen seperti misalnya kebakaran.

Ketika hal itu terjadi diharapkan masyarakat dapat berkoordinasi dengan pecalang setempat untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada tim siaga di posko PLN.

"Walaupun tim kami sudah dilengkapi surat dispensasi untuk menjalankan tugas pada saat Nyepi dari majelis adat, namun koordinasinya tetap ke masing-masing pecalang," katanya lagi. (ant)



Manager Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali I Made Arya memberikan informasi terkait aliran listrik PLN selama perayaan Nyepi, di Denpasar, Jumat (17/3). ANTARA/Rolandus Nampu.

Ketua Dewas Mengingatkan Kantor Berita Antara Harus Berani Beradaptasi

KETUA Dewan Pengawas Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Prof Dr Widodo Muktiyo mengingatkan Antara harus berani beradaptasi dengan berbagai perkembangan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

"Di era informasi saat ini banyak ketidakpastian. Rakernas ini mencoba melihat kilas balik dan memahami kekinian kita untuk menghadapi masa depan," katanya saat Pembukaan Rakernas Perum LKBN Antara di Yogyakarta, Rabu.

Hadir pada Rakernas bertema "Berani Beradaptasi" itu antara lain jajaran Dewas, Dirkomersil dan Pengembangan Bisnis Hempti N Prajudi, Direktur Pemberitaan Akhmad Munir, Direktur MSDM Keuangan dan Manajemen Risiko Nina Kurnia Dewi, para GM dan Kepala Divisi, Kepala Biro seluruh Indonesia dan Luar Negeri, Manajer, dan Koordinator.

Ia mengatakan Kantor Berita Antara turut berjasa dalam perjalanan bangsa, pada masa lalu, terutama pada masa-masa perjuangan kemerdekaan hingga menyebarkan Proklamasi Kemerdekaan.

Widodo yang juga Staf Ahli Menkominfo menyampaikan ungkapan "success in the past is not guarantee of success in the future" (sukses pada masa lalu bukan jaminan untuk meraih sukses pada masa depan).

Widodo mengingatkan Antara menjadi "produsen O2" yakni dengan menghasilkan dan menyebarkan informasi yang benar, sehat, dan menginspirasi.

Ia menegaskan LKBN Antara harus terus melahirkan posisi strategis. Diceritakan bahwa salah satu pendiri Antara, Adam Malik, pernah melesat ke posisi tertinggi sebagai Wakil Presiden. Saat ini Direktur Utama Meidyatama



Ketua Dewan Pengawas Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Prof Dr Widodo Muktiyo menyampaikan arahnya saat pembukaan Rakernas Perum LKBN Antara di Yogyakarta, Rabu (8/3/2023). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/wsj.

Suryodiningrat akan menjadi Duta Besar:

"Kita akan menjadi apa. Ini yang perlu kita pikirkan," katanya.

Ia mengatakan situasi saat ini, dikenal dengan VUCA yakni Volatility (dunia berubah cepat, bergeser, tidak stabil, dan tak terduga, tak bisa diprediksi), Uncertainty (masa depan penuh ketidakpas-

tian), Complexity (dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya), dan Ambiguity (lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami).

Kantor Berita Antara, katanya, harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang serba VUCA tersebut, dengan memastikan tetap Merah Putih. (ant)

